BAB III

PERAN FRAKSI KB DI DPRD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2009 – 2014 MENURUT UU NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DPRD

A. Profil DPRD Kabupaten Sumenep

DPRD Sumenep merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah seperti diatur dalam Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Disamping itu, DPRD juga sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2009, jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumenep sebanyak 50 orang yang merupakan representasi dari beberapa partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi di DPRD.

Jumlah kursi yang diperoleh masing – masing fraksi dengan komposisi sebagai berikut:[1]

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 11 kursi

[1] Hasil wawancara dengan ketua DPRD Sumenep, tanggal 08 Agustus 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 7 kursi
3. Fraksi Partai Golongan Karya : 4 kursi
4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 6 kursi
5. Fraksi PDI Perjuangan : 9 kursi
6. Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama : 4 kursi
7. Fraksi Bulan Bintang : 4 kursi
8. Fraksi Keadilan Demokrasi : 5 kursi

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 01 tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep pasal 36 adalah sebagai berikut :

a) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
b) Menetapkan APBD bersama Bupati.
c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati / wakil bupati kepada presiden melalui Mendagri / Gubernur.
e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

g) Tugas – tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang – undang.[2]

B. Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. Sekilas Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi.

Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang

---

[2] Situs DPRD Kab. Sumenep, *perda No. 01 tentang tata tertib DPRD kab.Sumenep.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.[3]

2. **Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MEMILIKI

1) Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2) Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-sidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-*

[3] DPW PKB Jawa Timur, *13 Alasan Memilih PKB*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wafau bi al-ahdi), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqamah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syura*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

3) Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

4) Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

5) Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

6) Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyyah*), kebangsaan (*ukhuwah wataniyyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

8) Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (*insaniyyah diniyyah*), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

9) Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.[4]

3. Asas Dan Prinsip Perjuangan PKB

1) Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2) Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan,

[4] Ibid. h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah waljamaah*.

4. **Fraksi PKB di DPRD Kab. Sumenep 2009-2014**

Partai membentuk fraksi disetiap lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat dan disebut dengan fraksi kebangkitan bangsa disingkat FKB. Fraksi merupakan perangkat partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. [5]

Dibawah ini adalah nama-nama anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Sumenep 2009-2014[6]

Susunan Pengurus
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Sumenep
Periode 2009-2014

Ketua FKB	: H. ABRORY, S.Ag.
Wakil Ketua FKB	: Drs. TAMAM
Sekretaris	: DUL SIAM, S.Ag, M.Pd
Bendahara	: SANHAJI DARMADYH

Anggota:

1. KH. Imam Hasyim, MH
2. H. Sukarnaedi

[5] Peraturan PKB, h. 38
[6] Arsip FKB Sumenep 2009-2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. KH. Abdul Hamid Ali Munir
4. Drs. KH. AKH. Mawardi, M.Pd.
5. H. MOH. Ruqi Abdillah, SH.
6. Drs. H. ABD. Rahman
7. KH. M. Naufal

DAFTAR NAMA PEJABAT ANGGOTA
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DI DPRD SUMENEP
Tahun Periode 2009-2014

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	KH. Imam Hasyim, MH	Ketua DPRD	
2	H. Abrory, S, Ag	Ketua Komisi A	*Menangani Bidang Hukum dan Pemerintahan*
3	Drs. Tamam	Anggota Komisi A	
4	H. Sukarnaedi	Sekretaris Komisi B	*Menangani Bidang Perekonomian*
5	Sanhaji Darmadyh	Anggota Komisi B	
6	KH. Abdul Hamid Ali Munir	Ketua Komisi C	*Menangani Bidang Infrastruktur/ Fisik*
7	Drs. KH. AKH. Mawardi, M.Pd.	Anggota Komisi C	
8	H. MOH. Ruqi Abdillah, SH.	Anggota Komisi C	
9	Drs. H. Abd. Rahman	Sekretaris Komisi D	*Menangani Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan*
10	KH. M. Naufal	Anggota Komisi D	
11	DUL Siam, S.Ag, M.Pd	Anggota Komisi D	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Peran FKB Dalam Legislasi Di DPRD Kab. Sumenep 2009-2014 berdasarkan UU NO. 27 TAHUN 2009

DPRD sebagai lembaga yang menyusun peraturan perundang- undangan, peraturan yang mengatur jurisdiksi, termasuk anggaran pemerintah, dijalankan anggota lembaga legislasi daerah dengan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat, sementara fungsi ketiga sebuah lembaga legislasi daerah adalah pengawasan, untuk memastikan akuntabilitas politik dan keuangan eksekutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 di jelaskan pada pasal 344 huruf C yang berbunyi

"*melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;*"[7]

Di sebutkan juga dalam pasal 37 Peraturan DPRD No. 02 Tahun 2010 Kabupaten sumenep bahwa fraksi mempunyai tugas;

a. menyusun dan menyampaikan pendapat umum rancangan peraturan daerah dalam rapat peripurna
b. memberikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah selain pada huruf (a) yang disampaikan dalam rapat paripurna

Ada 20 masalah strategis adalah pelayanan publik; penegakan peraturan daerah; usaha pariwisata; kawasan ekonomi khusus Surabaya-Madura; perikanan,

---

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peternakan, dan kesehatan hewan; pengelolaan sumber daya kelautan pulau-pulau kecil dan pesisir; tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kelautan.

Selain itu, masalah terkait dana cadangan penyelenggaraan pertambangan umum, migas, dan tenaga kelistrikan; sistem transportasi; perlindungan keselamatan pemakai jalan; perlindungan keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan perlindungan penyandang cacat.

Persoalan budgeting atau penganggaran pendapatan dan belanja daerah adalah bentuk instrumen utama dalam hal kebijakan publik supaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercipta.

Agar APBD menjadi anggaran pro rakyat miskin, beberapa perubahan penting harus didorong. Bila dibuat perencanaan dan implementasi dengan baik, anggaran yang telah ada sebenarnya sangat memadai untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan optimal.

Untuk mendorong agenda APBD pro rakyat miskin tersebut, salah satu aktor kunci ada di tangan DPRD. Sesuai dengan konstitusi, DPRD mempunyai tiga fungsi utama; fungsi anggaran *(budget)*, yaitu membahas dan menetapkan APBD bersama pemerintah. Fungsi legislasi *(legislation)*, yaitu menyusun dan menetapkan Perda-Perda. Dan fungsi pengawasan *(oversight)*, yaitu untuk mengawasi pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa alasan mengapa anggota DPRD Kab. Sumenep 2009-2014 dari FKB senantiasa memperjuangkan anggaran yang pro rakyat miskin, antara lain;[8]

Pertama, perjuangan mewujudkan kebijakan anggaran yang pro miskin merupakan bentuk konkrit pertanggungjawaban atas mandat perwakilan dari masyarakat. Sebagai anggota dewan, sudah seharusnya mereka menumpahkan semua perhatian kepada masyarakat, terutama yang miskin.

Kedua, bekerja secara serius untuk menaikkan pelayanan rakyat miskin melalui kebijakan anggaran akan menaikkan citra positif parlemen secara keseluruhan. Selama ini, pencitraan anggota legislatif belum kuat sebagai lembaga yang memiliki kepedulian secara langsung terhadap pengentasan pengentasan kemiskinan.

Ketiga, mengusahakan anggaran yang pro rakyat miskin berarti pula mendekatkan anggota dewan ke kalangan masyarakat sipil yang secara langsung sebagai konstituen nyata.

Perhatian yang serius terhadap masyarakat bawah merupakan komitmen dari PKB yang senantiasa menjadi garapan utamanya. PKB selalu menguatkan kesadaran dan komitmen bahwa kedekatan dengan konstituen harus terjadi. [9]

Perihal diatas tersebut sejalan dengan Pendapat Akhir FKB Kab. Sumenep 2009-2014 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep Tentang

---

[8] *Ibid.*, 57.
[9] *Ibid.*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

APBD Tahun Anggaran 2009, yang berbunyi; "....*Keempat, pemerintah harus menaruh perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang paling terkena dampak dari krisis ekonomi harus benar-benar dipersiapkan sejak akhir Tahun Anggaran 2010 yang sedang berjalan. Artinya basis data penduduk atau keluarga miskin harus sudah disiapkan dan dibenahi mulai sekarang*[10]

Dalam bidang pendidikan FKB akan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.[11]

Pandangan diatas tercermin pada Pendapat Akhir FKB Kab. Sumenep 2009-2014 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep Tentang APBD Tahun Anggaran 2006, yang berbunyi;[12]

> "... *Menanggapi hal ini Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai Pemerintah Kab. perlu berupaya secara lebih serius untuk meningkatkan proporsi anggaran pendidikan ini secara bertahap. Paling tidak dalam jangka waktu lima tahun ke depan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar, benar-benar dapat dipenuhi dan direalisasikan.*

---

[10] Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Sumenep Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep tentang APBD Tahun Anggaran 2009. 4.

[11] AD/ART PKB Bab V Tentang Tujuan dan Usaha Pasal 8. 5.

[12] Pendapat Akhir FKB Kab. Sumenep 2009-2014 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep Tentang APBD Tahun Anggaran 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta agar Eksekutif memberikan perhatian yang seimbang kepada sekolah-sekolah swasta, dimana dana pendamping pendidikan yang sedianya hanya dialokasikan bagi sekolah-sekolah negeri selayaknya diberikan pula kepada sekolah-sekolah swasta.

Selain itu perhatian yang seimbang juga perlu diberikan kepada sekolah-sekolah agama, khususnya MI, MTs, dan MA di wilayah Kab. Sumenep. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah menyangkut lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kab., dan Dinas Permukiman sehingga seringkali terjadi penurunan kualitas bangunan pendidikan karena pihak Dinas Pendidikan serta lembaga pendidikan yang terkait sebagai pengguna tidak dapat melakukan pengawasan pembangunan secara optimal. Hal ini perlu dicarikan solusi dan jalan keluarnya sehingga tidak terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2010 ini."

Di Bidang kesehatan Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sumenep membebaskan biaya kesehatan dasar bagi warga masyarakat, baik ditingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr. Susianto, M.Si mengatakan, untuk pemerintah Kabupaten Sumenep guna program kesehatan gratis, menyediakan dana sebesar Rp. 5,6 milyar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Pembebasan biaya kesehatan gratis berlaku sejak bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari hingga Desember 2010, dan masyarakat yang mendapat pelayanan pengobatan kesehatan gratis untuk semua lapisan, baik pasien Jamkesmas, Jamkesda dan masyarakat umum (keluarga mampu) lainnya.[13]

Adanya program tersebut FKB di kabupaten Sumenep senantiasa mendukung dengan mendorong pemerintahan daerah agar program tersebut di lakukan sesuai prosedur dan benar-benar berguna dan bagi rakyat sumenep khususnya bias menyentuh rakyat miskin, hal ini sesuai dengan perkatakan Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep dari FKB dalam Hasil menyatakan

> "*Kami sangat mendukung program Layanan Kesehatan Gratis Tersebut, kami meminta Kepada Bupati agar pelaksanaan program tersebut dapat menyentuh terhapad rakyat kurang manpu di wilayah kabupaten Sumenep*"[14]

Minimya pembangunan infrasturktur di Kabupaten Sumenep termasuk perbaikan jalan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas. Hal ini menjadi salah satu hal penting yang harus di upayakan perbaikan oleh pemerintahan Sumenep.

Pada waktu yang lalu banyak sekali kita jumpai kasus adanya dampak Lalu Lintas yang diakibatkan oleh pembangunan-pembangunan mall dan pusat

---

[13] ttp://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6425&Itemid=2. Diakses tanggal 23 November 2011.

[14] Hasil Wawancara dengan Drs. H. Abd. Rahman Komisi D DPRD kabupaten Sumenep, tanggal 09 Agustus 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertokoan maupun SPBU, hal ini jelas dikarenakan belum adanya manajemen penataan pembangunan serta kurangnya Pengawasan dan ketegasan dalam menegakkan hukum dari aparat Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tersebut.

Tidak jarang kepentingan pengusaha dalam rangka pembangunan infra struktur tersebut, seringkali mengalahkan kepentingan umum dalam hal ini, mereka berusaha merekayasa jalan maupun dampak lalu lintas.

Oleh karenanya Fraksi Kebangkitan Bangsa sangat mendukung upaya Pemerintah Kab. Sumenep dalam rangka meminimalisir dampak Lalu Lintas jalan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini. Harapannya Analisa Dampak Lalu Lintas ini, nantinya dapat dijadikan kajian mengenahi dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan fisik. Sehingga tidak ada lagi pengaruh dari pembangunan fisik tersebut yang berakibat pada perubahan tingkat pelayanan lalu lintas untuk masyarakat secara umum.

Disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus upaya Pemerintah Kab. Sumenep untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat sebagai beikut:

a. Peraturan Daerah ini hendaknya menjadi tolak ukur Pemerintah Kab. Sumenep dalam memanajemen pembangunan di Kab. Sumenep ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tim yang ditunjuk maupun Tenaga Ahli independen untuk mengkaji dan menyusun dokumen Andalalin hendaknya benar-benar bekerja secara profesional.

c. Kepada para pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas di sekitarnya wajib mendahulukan kepentingan umum dengan memperhatikan peraturan darah ini.[15]

D. Hubungan Antar Fraksi Kekuasaan di DPRD Sumenep

Fraksi kekuasaan di ranah DPRD memiliki hubungan yang baik antar fraksi, hal ini ditunjukkan oleh adanya kekompakan dan bentuk kerjasama dalam rangka membangun dan mengembangkan kota Sumenep. Kedudukan yang sama pastinya memiliki visi dan misi yang sama sehingga tidak ada alasan bagi segenap fraksi di DPRD Sumenep untuk memiliki konflik yang berarti.

Hampir tidak terdengar antar fraksi kekuasaan DPRD dikota Sumenep memiliki konflik yang sangat fatal. Meskipun persaingan antar fraksi tetap ada namun hal itu berjalan *fair* dan terbuka, karena memang pada hakikatnya ada persaingan politik antar fraksi karena DPRD di sumenep berasal dari partai yang berbeda.

---

[15] Pendapat Akhir FKB Sumenep Tentang Dampak Pembangunan Terhadap Lalu Lintas Dan Lingkungan Sekitar, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun jika antar fraksi memiliki kesamaan misi maka perbedaan fraksi dan persaingan tersebut tidak menjadi masalah besar. Justru sebaliknya, kekuasaan antar fraksi dapat menciptakan kerjasama yang baik, dan tetap memiliki hubungan yang baik pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id